

RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH DI GEDEBAGE BANDUNG

Muchtar

ABSTRACT

This study is aimed to identifies the people's resistance to the planned construction of waste to energy (WTE) in Gedebage Bandung and other impacts forecast will appear. The type of study is exploratory-qualitative. Informants: community and community leaders around WTE construction plans, with data collection techniques: interviews, observations, and documentation. The study showed: (1) resistance (blocking the activity of the project, conduct demonstrations) especially from the people closest to the location plan; (2) forecast the impact of: (a) economic aspects, although the developer promised to consider local residents to be employed, but limited in the construction phase WTE. Meantohile, when WTE has stood, only a few local residents who absorbed, so, increased the number of poor people; (b) health aspect, especially the people closest to the location plan, they worried with their health families, because the air pollution WTE can cause frigidity not only hit the women but also men; (c) culture aspects, will occur behavioral changes at local community because of meeting of various cultures. For that recommended: (1) the social aspects that have emerged, The Bandung City Government must accommodate the views of community's resistance with a democratic approach; (2) other aspects: (a) economic aspect, The Bandung City Government through its policies to create jobs for local residents who are relatively less educated; (b) health aspects, Bandung City Government and developers need to explain fully the negative impact of WTE air pollution scientifically by referring to experience of developed countries, and (c) cultural aspects, needs to prepare mentally community by involving social scientist in order to minimize the negative impacts due to the convergence of various different cultures.

Keywords : People's resistance, Waste to energy planned construction.

1. PENDAHULUAN

1.1 Konteks Studi

Dalam setiap proses perubahan biasanya selalu ada penolakan/resistensi baik secara individu maupun organisasi. Secara individu, berwujud persepsi yang apriori terhadap rencana perubahan meskipun terkadang individu tersebut belum mempunyai informasi dan data yang lengkap. Ia telah apriori, memberikan *judgement* atau cap bahwa proses perubahan pasti akan merugikannya, meskipun tidak selalu demikian. Secara organisasi, resistensi muncul dalam beragam bentuk, salah satunya adalah penentangan dari kelompok konservatif. Jika

kelompok tersebut kebetulan tengah berkuasa, hal ini menjadi rumit. Dalam proses perubahan biasanya terdapat siklus, yang dimulai dengan siklus penentangan/resistensi, yang dimulai dari menyangkal, menentang, diikuti menajaki dan diakhiri dengan memberikan komitmen (<http://rajabpresentasi.com>, 24/4 2010). Resistensi (*resistance*) berasal dari kata *resistance*, yang berarti menunjukkan ada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang. (<http://id.wikipedia.org/wiki/resistensi>, 24/4 2010).

Dalam konteks ini, rencana perubahan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Bandung dari *sistem open dumping* dan

sanitary landfill ke teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) atau *Waste to Energy (WTE)*. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, sampah menjadi permasalahan Kota Bandung Jawa Barat (2005). Sampah di kota ini menjadi masalah besar dan menyita perhatian publik yang tidak saja masyarakat Kota Bandung, tetapi juga masyarakat Indonesia lainnya. Permasalahan sampah di Kota Bandung berawal dari terjadinya bencana longsor di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah Kota Cimahi, 21 Februari 2005. *Sistem open dumping* (dibiarkan ditumpuk) di lokasi tersebut mengakibatkan musibah yang tidak saja menimbulkan kerugian material tetapi juga korban jiwa. Sejak itu, sampah di Kota Bandung menumpuk karena tidak terangkut sebagai akibat sulit mencari lokasi pengganti di luar kota Bandung, dan munculnya penolakan warga pada rencana lokasi TPA pengganti (Subrata, 2008).

Merespon terhadap permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Kota Bandung berencana mengembangkan pengolahan sampah melalui teknologi sebagai alternatif penanganan sampah secara konvensional yang menggunakan *sistem open dumping* dan *sanitary landfill* di Kota Bandung. Teknologi alternatif dimaksud adalah teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) atau *Waste to Energy (WTE)* di Kecamatan Gede Bage. Rencana PLTSA menjadi pilihan utama karena di Kota Bandung dinilai sudah tidak memadai lagi menggunakan sistem *open dumping* dan *sanitary landfill*, karena lokasi TPA sementara yang ada, berdaya tampung kecil, sehingga resiko sistem *open dumping* dikhawatirkan akan menimbulkan bencana seperti di TPA Louwigajah. Sementara itu, masalah *lindi* dan *gas methane* merupakan persoalan pengolahan sampah melalui sistem *sanitary landfill* sebagai residu yang membahayakan manusia.

Pertimbangan Pemerintah Kota Bandung memilih wilayah Gedebage sebagai calon lokasi PLTSA karena masih cukup tersedia lahan, sehingga memungkinkan pendirian PLTSA dimaksud. Sebenarnya pemerintah Kota Bandung, dengan *menggandeng* ilmuwan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melakukan *feasibility study*, hasilnya, merekomendasikan pendirian PLTSA di Gedebage.

Akan tetapi, rencana tersebut hingga saat ini masih terkendala akibat resistensi dari sebagi-

an masyarakat Gedebage khususnya yang berdekatan dengan calon lokasi PLTSA, yaitu masyarakat yang tinggal di komplek perumahan Griya Cempaka Arum dan Bumi Pitaloka yang berjarak sekitar 400-500 meter.

1.2 Fokus studi

Pembangunan PLTSA di Gedebage telah lama direncanakan Pemerintah Kota Bandung, yaitu sejak akhir 1990 an, rencana tersebut mengkristal tahun 2006. Akan tetapi, rencana pembangunan PLTSA tersebut diketahui masyarakat khususnya yang berdekatan dengan calon lokasi (hanya) melalui media massa, yang terjadi kemudian adalah muncul protes dari sebagian warga masyarakat. Bahkan protes rencana pembangunan PLTSA tersebut (juga) menjadi *isu* internasional, dalam pengertian, ada dukungan LSM internasional terhadap warga yang kontra terhadap rencana pembangunan PLTSA dimaksud.

Dengan demikian permasalahan pokok studi ini adalah bagaimana resistensi masyarakat dan prakiraan dampak lainnya (ekonomi, dan kesehatan) terkait rencana pembangunan PLTSA tersebut?

1.3 Tujuan dan manfaat

Berdasarkan permasalahan pokok tersebut, kajian ini bertujuan:

- Mengidentifikasi resistensi masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTSA.
- Memprakirakan dampak ekonomi, kesehatan, dan perilaku yang muncul kemudian.

Secara praktis, hasil studi ini dapat menjadi *input* pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Bandung khususnya, pemerintah daerah lainnya, serta pemerintah pusat umumnya untuk melanjutkan atau mencari alternatif lain terkait rencana pembangunan PLTSA, dengan tetap mempertimbangkan perspektif pembangunan berpusat pada manusia, dimana paradigma ini, saat ini, menjadi aspek penting dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan secara akademik, bagi para ilmuwan khususnya ilmuwan sosial, dapat menambah informasi yang telah tersedia terkait rencana pembangunan PLTSA dalam kerangka penanganan masalah (sampah) agar tidak memunculkan masalah sosial lain.

1.4 Pembangunan sosial dan pembangunan berpusat pada manusia

Pada awal perkembangannya, pembangunan sosial sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan, dikontraskan dengan pembangunan ekonomi. Hal itu terkait dengan pemahaman banyak orang yang menggunakan istilah pembangunan yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi sebagai akibat industrialisasi (Midgley dalam Adi, 2002: 116). Hal itu wajar karena pendekatan pembangunan yang dikenal sejak tahun 1950-an hingga akhir 1970-an sangat erat dengan pendekatan ekonomi dalam perspektif teori modernisasi. Akan tetapi, sejak awal 1980-an pembangunan sosial sebagai pendekatan pembangunan dapat saling bekerjasama dengan pembangunan fisik dan pembangunan ekonomi. Terkait itu, Midgley memberikan batasan pembangunan sosial sebagai: *"a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as whole in conjunction with a dynamic process of economic development"* (1995:25).

Sejalan dengan pemikiran itu, ESCAP (dalam Adi, 2002:147) berpandangan, tujuan pembangunan sosial pada dasarnya adalah mengembangkan taraf hidup manusia. Dengan demikian, penekanan utama pembangunan sosial adalah pendekatan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Sehingga, terdapat kesamaan gerak dari pembangunan sosial dan pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu keduanya fokus pada upaya peningkatan taraf hidup manusia. Aspek penting dalam pembangunan yang berpusat pada manusia adalah menjaga dan lestariannya aspek lingkungan (Korten, 1984:299). Selanjutnya Ia menegaskan: *"the dominant logic of this paradigm is that of balanced of human ecology..."* (h.300).

Dari batasan itu dapat difahami, perlunya pembangunan secara terintegrasi, artinya, pembangunan bidang tertentu harus mendukung bidang pembangunan yang lain. Dalam konteks ini, pembangunan PLTSa jangan menyampingkan aspek kehidupan masyarakat sekitar calon lokasi PLTSa. Karena, pada akhirnya tujuan pembangunan PLTSa adalah dalam kerangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan pandangan itu, dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan manusia,

aspek kesinambungan dan lestariannya lingkungan perlu menjadi titik perhatian. Kedua telaah singkat pembangunan sosial dan pembangunan berpusat pada manusia tersebut menjadi alat analisis teoritis studi ini.

1.5 Metode

Jenis studi ini adalah eksploratif-kualitatif. Eksploratif dalam pengertian menggali berbagai pendapat dan pandangan dari unsur masyarakat "pra-kontra" dan pemuka masyarakat. Sedangkan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh informasi "mengapa". Dalam konteks ini, mengapa warga masyarakat terpolarisasi menjadi dua kutub yang (seakan) saling berhadapan? Informan ditentukan secara *purposive sampling*. Atas dasar itu, informan dalam kajian ini adalah: masyarakat sekitar rencana lokasi (pro-kontra) dan pemuka masyarakat Gede Bage (formal, non formal). Teknik pengumpulan data menggunakan: wawancara, yang ditujukan kepada masyarakat dan pemuka masyarakat, observasi, guna melihat dari dekat calon lokasi PLTSa dan jarak pemukiman terdekat dengan calon lokasi; serta dokumentasi, berupa: pandangan dan kebijakan Pemkot Bandung terkait rencana pembangunan PLTSa. Selanjutnya, data lapangan yang telah terkumpul, di analisis secara kualitatif melalui rangkaian proses: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

II. SELAYANG PANDANG WILAYAH GEDEBAGE DAN PROYEK PLTSa

2.1. Wilayah Gedebage

Kecamatan Gedebage merupakan wilayah pemekaran Kota Bandung di sebelah Timur yang terdiri dari empat kelurahan, yaitu: Kelurahan Cisaranten Kidul, Kelurahan Cimincrang, Kelurahan Rancanumpang, dan Kelurahan Rancabolang. Sebagian besar wilayah Gedebage adalah tanah sawah dan ladang ($\pm$ 70 %) dari keseluruhan luas wilayahnya. Jumlah penduduk Gedebage: 25.943 jiwa (7383 KK) yang tersebar di empat kelurahan tersebut, masing-masing: 13.493 jiwa, di Kelurahan Cisaranten Kidul, 2.504 jiwa, di Kelurahan Cimincrang, 4.113 jiwa di Kelurahan Rancanumpang, dan 5.672 di Kelurahan Rancabolang.

Kebijakan pengembangan Gedebage tidak terlepas dari visi Pemerintah Kota Bandung yang akan menjadikannya sebagai sentra pengembangan jasa di wilayah Kota Bandung. Sejalan dengan visi itu, Gedebage direncanakannya menjadi wilayah primer dan sekunder. Wilayah Kelurahan Cisaranten Kidul menjadi wilayah primer dengan mengembangkan pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan dan keagamaan. Sementara itu, pendirian PLTSA dan Sarana Olah Raga Internasional (SOR) dicanangkan di Kelurahan Rancanumpang sebagai wilayah pengembangan sekunder. Lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan PLTSA sekitar 10 Ha, dengan tata guna lahan 3 Ha untuk penempatan bangunan dan mesin pabrik, sedangkan 7 Ha lainnya untuk zona penyangga atau *green belt* berupa taman dan hutan kota (Subrata, 2008).

Secara geografis Kelurahan Rancanumpang berada di bagian timur Kecamatan Gedebage, yang kondisi wilayahnya sebagian besar adalah tanah sawah dan ladang. Pemukiman penduduk di kelurahan ini terdiri dari pemukiman penduduk asli yang banyak tersebar di RW 01 dan RW 02, dan pemukiman penduduk pendatang bertempat tinggal di kompleks-kompleks perumahan, berada di RW 03-RW 08. Secara demografis, struktur umur penduduk Kelurahan Rancanumpang menunjukkan, penyebaran jumlah yang merata pada setiap kelompok umur. Namun bila digolongkan menurut kelompok usia muda, kelompok usia produktif dan usia lanjut menunjukkan jumlah tertinggi. Pada kelompok usia produktif 20-54 tahun berjumlah 2278 jiwa. Pada umumnya, sebagian besar penduduk (usia produktif) Kelurahan Rancanumpang bekerja di tempat lain. Secara lebih jelas, kondisi demografis masyarakat Kelurahan Rancanumpang terlihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	L	P	Jumlah
1.	0 - 4	167	138	305
2.	5 - 9	173	149	322
3.	10 - 14	117	132	249
4.	15 - 19	133	141	274
5.	20 - 24	130	153	283
6.	25 - 29	154	160	314
7.	30 - 34	147	121	268
8.	35 - 39	154	169	323
9.	40 - 44	191	179	370
10.	45 - 49	174	169	343
11.	50 - 54	199	196	395
12.	55 - 59	138	136	274
13.	60 - 64	154	125	279
14.	65 ke atas	156	141	297
		2187	2091	4278

Sumber : Monografi Kelurahan Rancanumpang, 2008.

Cukup banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, yang pada umumnya pendatang (bukan penduduk asli) dan tinggal di kompleks perumahan (RW 03-08). Hal ini terlihat pada data yang menunjukkan, terdapat 771 orang yang berpendidikan tinggi (Akademi/Diploma dan Sarjana), Sementara itu, terdapat 772 orang berpendidikan rendah (tidak tamat SD dan tamat SD) yang pada umumnya penduduk asli. Secara lebih jelas terlihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak/belum sekolah	429	395	824
2.	Tidak tamat SD	120	132	252
3.	Belum tamat SD	133	210	343
4.	Tamat SD	300	250	550
5.	SLP	416	533	949
6.	SLA	322	267	589
7.	Akademi/Sarjana Muda	193	152	345
8.	Sarjana	274	152	426
		2187	2091	4278

Sumber : Monografi Kelurahan Rancanumpang, 2008.

Mata pencarian penduduk (asli) pada umumnya sektor tani. Petani terbagi atas tiga kelompok, yaitu: (a) petani pemilik, artinya petani yang memiliki sawah, (b) petani penggarap (*maro*) atau bagi hasil dengan pemilik tanah, dan (c) buruh tani, yang biasanya menjadi buruh para penggarap tanah. Petani di Rancanumpang sebagian besar adalah petani penggarap dan buruh tani. Sehingga apabila lahan pertanian akan dijadikan lokasi pembangunan PLTSA (10 Ha), maka sumber mata pencarian penduduk yang bertani akan berkurang dan akan menambah jumlah pengangguran yang berarti pula menambah jumlah penduduk miskin.

2.2 Proyek PLTSA

Waste To Energy atau diIndonesiakan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dengan bahan bakar sampah, merupakan salah satu pilihan strategis penanganan sampah. PLTSA merupakan solusi sampah permanen karena dengan teknologi PLTSA, pengolahan sampah tidak menyisakan persoalan seperti pada teknologi *Sanitary Landfill* yang menyisakan *landi* atau *gas methana* yang membahayakan manusia, apalagi *Open Dumping* sudah *out of date* (Subrata, 2008).

Menurut Ketua Tim *Feasibility Study* Kota Bandung, Ari Darmawan Pasek, berdasarkan

kojian di beberapa negara, jenis PLTSA yang cocok diterapkan di Kota Bandung adalah PLTSA kondensor berpendingin air. Berkapasitas 500-700 ton/hari dengan kebutuhan air baku 20 liter/detik. Kebutuhan air baku tersebut akan diperoleh dari air olahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PDAM Kota Bandung yang berlokasi di Bojongsang.

PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL) akan membangun pemusnahan sampah dengan menggunakan teknologi *WTE* atau kemudian dikenal dengan nama PLTSA Bandung. Kapasitas PLTSA Bandung direncanakan mampu memusnahkan sampah sebanyak 2000 s/d 3000 m² per hari. PLTSA Bandung akan menghasilkan listrik sebesar 7 MW, listrik yang dihasilkan akan dijual kepada PLN.

Rencana lokasi proyek PLTSA adalah kawasan pertanian sawah dan palawija, perumahan, jalan tol, dan jalan kereta api. Untuk lebih jelas dikemukakan sebagai berikut:

- Utara - Timur Laut merupakan areal pertanian/persawahan dan jalan kereta api, jarak dengan bangunan utama PLTSA sekitar 1100 meter.
- Timur berbatasan perkampungan Babakan Sindang pada jarak sekitar 120 meter dari bangunan utama PLTSA dan lahan pertanian di Kabupaten Bandung.
- Selatan - Tenggara dibatasi oleh jalan tol padaleunyi, jarak dengan bangunan utama PLTSA sekitar 180 meter, yang juga merupakan perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Di seberang jalan tol ada rumah penduduk (Kampung Babakan Sayang), dengan bangunan utama PLTSA pada jarak sekitar 250 meter.
- Sebelah Barat - Barat Laut: persawahan dan pada jarak 400-700 meter dari bangunan utama PLTSA terdapat Perumahan Cempaka Arum, dan pada jarak 850 meter Perumahan Pitaloka.

Secara umum, rencana pembangunan proyek PLTSA terdiri atas dua bagian utama, yaitu bangunan utama PLTSA yang terdiri atas:

- Ruang terima sampah (ruang ini bertekanan negatif artinya tekanan di luar ruangan lebih besar daripada dalam ruangan).
- Bunker kedap air, tempat meniriskan sampah yang dirancang mampu menampung

10.000 m² sampah. Bunker memiliki enam buah pintu yang menghubungkan antara ruang penerima sampah dengan bunker.

- Tempat penampungan lindi kedap air.
- Tungku pembakaran dan boiler dua buah.
- Turbin/generator 2 buah.
- Sistem pengolahan gas buang yang dilengkapi dengan sistem pemanfauan gas buang (10 parameter) yang bekerja secara continue (CEM).
- Saluran listrik menghubungkan PLTSA dengan saluran listrik 20 Kva milik PLN yang letaknya sekitar 300 meter di sebelah utara tapak PLTSA Bandung.
- Cerobong (diameter 1,5 meter, tinggi 70 meter).

Sementara itu, infrastruktur pendukung PLTSA terdiri atas :

- Jembatan timbang truk sampah 2 buah.
- Rumah Pampa.
- Menara Pendingin (*cooling tower*).
- Sistem pengolahan limbah cair (lindi).
- Tangki Penyimpanan bahan bakar minyak (sebagian berada dalam tanah).
- Step up transformer*.
- Gardu Jaga.
- Portal.
- Tempat pengolahan/solidifikasi *fly ash* (debu terbang) dan *bottom ash* (abu) menjadi bahan bangunan.
- Tempat penampungan sementara *fly ash* (debu) dan *bottom ash* (abu) yang telah disolidifikasi (menjadi bahan bangunan).
- Sumur pantau 3 buah dengan kedalaman 40 meter (sampai dengan bagian bawah air tanah dangkal).
- Jalan akses yang menghubungkan antara jalan tol/gedung SCOR dengan PLTSA.
- Tempat Parkir.
- Kantor.
- Tempat sembahyang dan.
- Asrama karyawan yang dilengkapi dengan klinik, kantin, toilet (kantin akan dilengkapi dengan perangkap minyak dan lemak sedangkan toilet dilengkapi dengan *septic tank*).

Terkait dengan kebutuhan air PLTSA, PT BRIL berencana bekerjasama dengan Peru-

sahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung dalam hal penyediaan air baku dan pengolahan limbah cair. Pada perjanjian kerjasama tersebut, pada intinya, PDAM akan membangun saluran air dari Bojongsoang sampai PLTSA. Saluran air tersebut akan digunakan untuk menyalurkan air buangan dari PLTSA dan menyalurkan air baku dari Bojongsoang ke lokasi PLTSA. Disamping itu, PDAM akan membangun fasilitas pengolahan limbah cair PLTSA di Bojongsoang. PT BRIL sebagai yang menerima jasa akan membayar jasa pasokan air baku dan pengolahan limbah cair kepada PDAM Kota Bandung.

Pembangunan fasilitas pengolahan limbah PLTSA di Bojongsoang dan saluran air untuk air tersebut merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PDAM Kota Bandung dan saat dokumen AMDAL disusun, study pra kelayakannya sudah selesai disusun.

Kebutuhan air baku yang akan dipasok oleh PDAM Kota Bandung dari Bojongsoang sebesar 20,42 liter/detik. Air baku tersebut berasal dari olahan air kotor Kota Bandung yang telah selesai diolah di Bojongsoang yang telah memenuhi baku mutu untuk dibuang ke Sungai Citarum. Berdasarkan kerjasama ini sebelum air hasil olahan dibuang ke Sungai Citarum, air akan dialirkan terlebih dahulu ke PLTSA Bandung untuk dijadikan sebagai air pendingin dan sebagian lagi akan diolah lebih lanjut di PLTSA untuk dijadikan air proses dan air umpan ketel.

Air pendingin yang telah digunakan kemudian akan dialirkan kembali ke Bojongsoang dan di buang ke Sungai Citarum dengan temperatur air pendingin sudah normal kembali. Kebutuhan air untuk para pekerja diperkirakan sebesar 50 liter x 200 orang = 10.000 liter/hari atau 10 m³ per hari. Sumber air bersih untuk kebutuhan pekerja akan dipenuhi dari air tanah dalam atau dari air proses.

III. TEMUAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Resistensi masyarakat

Pandangan masyarakat yang kontra pendirian PLTSA setidaknya berkaitan dengan ketidaknyamanan hidup. Mereka menilai bahwa apapun nama dan bentuknya, tetap saja PLTSA adalah tempat pembuangan sampah akhir

yang akan menimbulkan polusi atau pencemaran lingkungan baik air, udara dan tanah.

Salah satu pemahaman tentang pencemaran udara adalah bahwa pembuangan gas pembakaran sampah yang dibuang ke udara melalui cerobong, apabila ada hujan maka gas yang keluar tidak akan jauh terbawa angin, tetapi akan langsung jatuh ke tanah bersamaan air hujan (penurunan salah seorang warga Kompleks Perumahan Griya Pitaloka). Dengan demikian dikhawatirkan partikel zat-zat yang berbahaya hasil pembakaran sampah akan banyak menyebar di wilayah Rancanumpang bersamaan dengan turunnya air hujan. Warga tersebut juga khawatir, bila terjadi kerusakan pada komponen mesin atau komponen pengolahan sampah, akan mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar.

Kekhawatiran lain juga dijelaskan seorang warga di Komplek Perumahan Cempaka Arum, dari sisi kesehatan, dalam waktu tertentu, asap PLTSA akan mengakibatkan frigiditas yang tidak saja bagi ibu-ibu tetapi juga dikalangan kaum laki-laki. Ia memberikan contoh kasus di Inggris, dalam kurun waktu 10-an tahun frigiditas tersebut terjadi. Ia mendapatkan informasi tersebut dari sebuah situs di internet. Kekhawatiran warga khususnya ibu-ibu berkaitan dengan dampak yang mungkin bisa menimpa anak-anak mereka. Ibu-ibu merasa khawatir karena polusi khususnya polusi udara bisa mengganggu tumbuh kembang anak-anak mereka.

Memang, sudah ada contoh PLTSA di negara lain, Singapura misalnya, dimana PLTSA di negeri Singa tersebut dibangun ditepi pantai bukan di tengah pemukiman warga seperti disini. Penempatan PLTSA yang jauh dari pemukiman di negeri Singa tersebut diyakini warga bukan tanpa sebab, tetapi pastilah ada penyebabnya, yang menjadi pertimbangan pemerintah Singapura mendirikan PLTSA tidak berdekatan dengan pemukiman warga. Bahkan warga yang kontra yakin, pendirian PLTSA di sini, sangat mungkin banyak ketentuan/standar yang tidak diikuti dan sengaja dilanggar.

Salah satu warga Komplek Perumahan Arum tersebut menambahkan, dari sisi teknologi, teknologi pengolahan sampah (insenerator) yang akan digunakan adalah produk RRC (Cina). Seperti diketahui masyarakat, produk-produk cina, baik yang berjenis makanan maupun non makanan (peralatan rumah tangga,

kosmetik, alat-alat elektronik, mesin) secara kualitas kurang/tidak baik. Apalagi ini teknologi tinggi (insenerator). Hal ini, menurutnya semakin menambah ketidakpercayaan dan kontra masyarakat terhadap rencana Pemkot Bandung membangun PLTSA di Gedebage.

Respon masyarakat yang kontra diwujudkan melalui berbagai macam cara. Demo dan aksi-aksi protes kelompok masyarakat. Aksi protes melalui pemasangan spanduk yang sampai studi lapangan Andalsos ini dilakukan masih banyak terpampang disekitar komplek perumahan Griya Cempaka Arum. Demo maupun penggerakan massa telah dilakukan berkali-kali oleh masyarakat yang kontra. Demo ditujukan kepada pihak-pihak terkait pembangunan PLTSA baik aparat pemerintah dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai ke tingkat Kota serta kepada pihak pengembang (PT. BRIL). Namun demikian aksi demo yang dilakukan warga menurut salah seorang aparat polsek tidak menimbulkan kejadian yang bersifat anarkis walaupun sering menimbulkan keributan yang cukup mengganggu warga lain.

Pada saat studi lapangan ini dilakukan, warga Griya Cempaka Arum telah melakukan *class action* terhadap Wali Kota Bandung, DPRD, PD Kebersihan, dan PT BRIL. Gugatan warga tersebut merupakan bagian aksi kontra terhadap rencana pembangunan PLTSA dan menunjukkan adanya konflik terbuka oleh warga terhadap pihak-pihak terkait pembangunan PLTSA di Gedebage. Gugatan berkaitan dengan adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung No. 685 yang dinilai warga mengubah fungsi kawasan Bandung Timur dari semula pemukiman menjadi kawasan Industri. Perwal tersebut dinilai bertentangan dengan Perda Kota Bandung No. 2/2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota. Pendirian PLTSA sebagai industri pengolahan sampah sangat berbau KKN.

Terkait *class action*, ketika Hakim Pengadilan Negeri Bandung membacakan penolakan gugatan warga Kompleks Griya Cempaka Arum dalam sidang putusan sela, pengacara warga dan warga yang hadir melakukan aksi *walk-out*. Warga merasa ada sesuatu yang ganjil berkaitan dengan putusan hakim tersebut. Dalam putusan pertama, *class action* dinilai sah dan diterima, tapi pada putusan kedua, dikatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang.

Putusan penolakan gugatan warga oleh PN Bandung tidak membuat warga Griya Cem-

paka Arum menerima begitu saja. Salah satu tokoh warga Griya Cempaka Arum mengemukakan bahwa gugatan yang telah dilayangkan bukan satu-satunya gugatan, akan ada banyak gugatan termasuk pidana tata ruang sarana olah raga (SOR) yang juga akan dibangun pemerintah di wilayah Kelurahan Rancanumpang.

Menanggapi ditolaknya *class action* mereka, salah seorang tokoh warga yang kontra mengatakan bahwa, mereka akan tetap meneruskan perjuangan mereka untuk melakukan banding ke tingkat pengadilan tinggi.

Upaya menolak melalui aksi demo dilakukan pula oleh kelompok masyarakat di Perumahan Griya Pitaloka, yang membuat surat tertulis yang berisi keberatan warga dan ditandatangani oleh sebagian warga perumahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait pendirian PLTSA. Para ibu di komplek perumahan ini pada umumnya tidak menyetujui pendirian PLTSA di dekat lokasi pemukiman mereka. Alasan utama mereka adalah ketakutan munculnya polusi yang berbahaya bagi kesehatan khususnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Bau yang menyengat (menurut ibu-ibu) tidak dapat dihindari lagi. Alasan mereka sederhana, satu truk sampah saja yang lewat di jalan, baunya sudah demikian menyengat, apalagi PLTSA, yang pasti akan banyak sekali mobil-mobil pengangkut sampah yang lalu lalang, ini tentu akan menyebarkan bau sampah yang luar biasa.

Aksi-aksi lain dari warga terkait penolakan mereka terhadap rencana pembangunan PLTSA adalah apabila pengembang memasangkan patok-patok di lokasi PLTSA, keesokan harinya patok-patok tersebut pasti akan hilang.

Melalui wawancara juga diperoleh informasi bahwa warga yang kontra akan terus berjuang menggagalkan pendirian PLTSA di wilayah mereka. Dengan cara apapun dan upaya apapun, mereka bertekad agar pemerintah tidak memaksakan kehendaknya mendirikan PLTSA di sekitar wilayah pemukiman penduduk, bahkan mereka mengaku telah mendapatkan dukungan dari LSM internasional peduli lingkungan.

Munculnya resistensi tersebut dimungkinkan karena perlakuan kurang partisipatif, demokratis, dan transparan dari Pemkot Bandung saat itu terhadap masyarakat di sekitar calon lokasi PLTSA. Hal itu terlihat dari tidak adanya komunikasi dan informasi langsung kepada mereka

ketika gagasan PLTSA itu diluncurkan. Mereka mengetahui bahwa dekat pemukiman mereka akan dijadikan calon lokasi PLTSA justru dari media massa. Secara teoritis, kondisi ini belum sejalan dengan dengan konsep pembangunan sosial, dimana masyarakat perlu diposisikan sebagai subjek pembangunan dan bukan semata objek pembangunan.

3.2. Prakiraan dampak

a. Sosial

1. Tahap pra konstruksi.

Petani penggarap di lahan seluas kurang lebih 10 ha. terkena dampak langsung dari rencana pembangunan PLTSA Gedebage. Mereka gelisah mendengar rencana pembangunan PLTSA tersebut, yang pasti, mereka akan kehilangan sumber pencarian yang telah mereka garap secara turun temurun. Pada tahap pra konstruksi ketika pembebasan lahan, secara otomatis petani penggarap tidak boleh lagi menggarap lahan.

Kegelisahan para petani penggarap berkaitan dengan apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kehilangan mata pencaharian sebagian warga merupakan dampak negatif penting yang perlu mendapat perhatian, karena petani penggarap tersebut tidak mempunyai lahan garapan lagi, dan jumlahnya tidak sedikit.

Keresahan tidak saja dirasakan oleh petani penggarap, tetapi juga dirasakan oleh kelompok masyarakat yang tinggal (bermukim) berdekatan dengan calon lokasi proyek pembangunan PLTSA yaitu Komplek Perumahan Griya Pitaloka dan Cempaka Arum. Keresahan berkaitan dengan kekhawatiran mereka bahwa tempat tinggal mereka bersebelahan langsung dengan pembuangan sampah. Walaupun masyarakat sudah mendapat penjelasan bahwa PLTSA yang akan didirikan di wilayah RW 01 Kelurahan Rancanumpang bukan tempat pembuangan sampah, tetapi, pengolahan sampah dengan menggunakan insenarator/mesin pengolahan sampah modern dan tidak menimbulkan penumpukan sampah.

PT Bril telah mengupayakan pembuatan AMDAL yang dilakukan oleh Tim AMDAL ITB, dan hasilnya merekomendasikan bahwa pendirian PLTSA ini layak lingkungan sepanjang hasil uji coba bisa memenuhi persyaratan lingkungan

dan apabila pemrakarsa bisa menunjukkan kinerjanya dalam mengelola lingkungan. Namun demikian, hasil AMDAL tersebut tetap tidak bisa membuat yakin masyarakat yang kontra pendirian PLTSA.

Pemerintah Kota Bandung dalam menyosialisasikan pembangunan PLTSA kepada masyarakat dianggap cukup maksimal. Buktinya adalah, dibentuknya Tim Sosialisasi pembangunan PLTSA, yang bertugas menyosialisasikan pembangunan PLTSA kepada masyarakat. Tim sosialisasi terdiri dari berbagai tokoh dan anggota masyarakat. Sebagai ketua adalah Ketua RW 01 Kelurahan Rancanumpang. Disamping itu, pemerintah juga telah memberangkatkan masyarakat baik yang pro maupun kontra PLTSA ke Singapura, untuk studi banding, melihat kegiatan PLTSA. Upaya lain yang juga dilakukan dalam rangka sosialisasi pembangunan PLTSA adalah dengan membagikan CD kepada masyarakat, yang menggambarkan proses pengolahan sampah sejak awal hingga akhir yang menghasilkan energi listrik di Singapura.

Hasil tim sosialisasi dan upaya-upaya pemerintah tersebut dirasakan membawa hasil. Ketua tim sosialisasi mengestimasi, sekitar 60% warga setuju pendirian PLTSA asal betul-betul seperti di Singapura 20% warga menerima dengan syarat dan 20% warga lainnya menolak tanpa syarat. Namun demikian, walaupun jumlah warga yang menerima lebih dominan atau lebih tinggi jumlahnya, warga yang menolak tetap berjuang gigih untuk menggagalkan pendirian PLTSA di wilayah tempat tinggal mereka.

Upaya-upaya yang dilakukan warga pada tahap pra konstruksi untuk menolak keberadaan PLTSA di wilayah mereka, baik dengan cara yang legal melalui demo ataupun dengan cara lainnya seperti melakukan *class action* merupakan dampak negatif penting karena aksi-aksi masyarakat tersebut bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan memunculkan konflik-konflik baik antar warga masyarakat ataupun dengan aparat pemerintah.

2. Tahap konstruksi/operasional

Pembangunan PLTSA merupakan proyek besar. Pengerjaannya membutuhkan waktu panjang dan tenaga kerja yang tidak sedikit khususnya tenaga kasar. Oleh karena itu, begitu pembangunan proyek ini dimulai berarti pe-

luang kerja bagi penduduk asli setempat dan sekitarnya untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia (semacam padat karya).

Penyerapan tenaga kerja warga setempat pada tahap ini merupakan salah satu dampak positif dari pembangunan PLTSA. Penyerapan tenaga kerja juga diperkirakan akan terjadi karena berkembangnya sektor ekonomi informal berupa wirausaha/berjualan antara lain: warung nasi/minuman dan kebutuhan sehari-hari lainnya di sekitar proyek.

Namun demikian, disamping dampak positif tersebut, pembangunan PLTSA yang akan berlangsung lama tersebut, menyebabkan lalu-lalangnya kendaraan proyek. Sehingga debu, kebisingan, dan lain sebagainya menjadi tidak terhindarkan/mengganggu warga masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan lokasi proyek. Ketenangan dan kenyamanan warga masyarakat mulai terusik. Polusi akibat lalu-lalangnya kendaraan proyek dan aktivitas proyek yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap ketenangan dan kenyamanan masyarakat merupakan dampak negatif penting.

Pada tahap operasional, ketika PLTSA mulai menjalankan kegiatannya, lalu lalang kendaraan pengangkut sampah yang datang dari pelbagai penjuru wilayah Kota Bandung diperkirakan puluhan truk/hari dan antrian panjang truk pengangkut sampah yang menyebabkan bau sampah tidak terhindarkan. Kebisingan dari lalu lalangnya kendaraan truk pengangkut sampah maupun dari alat pengolah sampah juga akan mengusik kenyamanan dan ketenteraman kehidupan warga sekitar. Aktivitas proses pengangkutan dan pengolahan sampah dapat menjadi dampak negatif penting yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan warga yang rumahnya berdekatan dengan PLTSA.

Hasil wawancara dengan warga, mereka berpendapat bahwa polusi udara akibat asap pembakaran sampah yang mengandung zat-zat berbahaya juga tidak terhindarkan, walaupun dalam pembuangannya melalui cerobong tinggi, namun pengeluaran asap dan gas dari cerobong tersebut dianggap tetap mencemari udara dan membahayakan kesehatan karena secara geografis Kota Bandung terletak di cekungan diantara pegunungan. Hasil kajian AM-DAL ITB menunjukkan bahwa pembuangan asap akan dilakukan melalui cerobong yang

ketinggiannya sudah diperhitungkan untuk menjamin keamanan pembuangan asap tidak sampai menimbulkan polusi bagi warga sekitar. Oleh karena itu polusi asap tetap menjadi dampak negatif penting yang harus menjadi perhatian, sehingga dalam uji coba dapat benar-benar diperhitungkan keamanan tingginya cerobong asap tersebut.

Penyerapan tenaga kerja warga sekitar pada tahap ini juga merupakan salah satu dampak positif penting, bila pihak pengembang menepati janji untuk mempekerjakan dan merekrut warga sekitar untuk bekerja di PLTSA. Jika demikian halnya, peningkatan penghasilan warga akan sejalan dengan beroperasinya PLTSA, khususnya mereka yang bekerja di PLTSA maupun warga yang menyediakan jasa bagi pegawai PLTSA seperti: *catering*, pemondokan, warung nasi, maupun jasa pelayanan toko.

Peningkatan penghasilan juga dapat dirasakan oleh warga yang bekerja di sektor informal lainnya, jika PLTSA menjadi salah satu obyek "wisata sampah" di Kota Bandung. Salah satu Informan utama menyatakan bahwa salah satu tuntutan warga yang setuju namun dengan mengajukan syarat-syarat tertentu adalah akan meminta pihak pemkot untuk menyiapkan lahan untuk sentra perdagangan dan kerajinan. Sentra perdagangan dan kerajinan ini diharapkan dapat menjadi paket kunjungan wisata sampah Gedebage.

b. Budaya

Dampak terhadap budaya masyarakat setempat dapat disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar lokasi pembangunan PLTSA, baik akibat pengerjaan proyek maupun setelah beroperasinya PLTSA. Dengan berdirinya PLTSA dan proyek bangunan lain yang terintegrasi di Gedebage akan memunculkan perilaku-perilaku (budaya) baru masyarakat setempat, baik yang positif maupun negatif sebagai akibat dari bertemunya pelbagai budaya yang berbeda (penduduk asli dan pendatang "pekerja dari luar daerah/asing dan wisatawan").

Dampak perilaku positif yang akan muncul antara lain: perilaku disiplin masyarakat setempat dalam mengelola sampah keluarga mereka. Wilayah Rancanumpang yang sangat dekat dengan PLTSA dapat menjadi daerah percontohan dalam pengaturan pembuangan sampah. Pemisahan sampah organik dan an-

organik atau sampah plastik, kaca, logam terpisahkan dari sampah basah. Perubahan gaya hidup dapat menjadi dampak positif bila warga semakin menjaga dan membiasakan untuk hidup bersih, dorongan untuk menjaga kebersihan dan kerapian, karena daerahnya menjadi tujuan wisata (domestik, manca negara).

Dampak negatif berkaitan dengan kemungkinan munculnya perilaku-perilaku negatif akibat pengerjaan proyek yang cukup lama dan operasional proyek. Pekerja proyek yang datang dari luar wilayah Rancanumpang akan tinggal di wilayah proyek dalam waktu yang cukup lama. Keadaan menetap jauh dari keluarga dan pekerjaan yang berat sering mendorong keinginan untuk mendapatkan hiburan. Munculnya perilaku negatif karena faktor pendorong dari dalam diri dan penguat dari lingkungan antara lain: kegiatan prostitusi sebagai akibat adanya permintaan, kegiatan perjudian, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, dan lainnya.

Perubahan gaya hidup negatif bila warga yang mendapatkan peningkatan penghasilan menjadi bersikap boros atau konsumtif. Lingkungan pergaulan yang baru karena akulturasi budaya dari pekerja pendatang atau wisatawan, dapat membuat perubahan gaya hidup bila tidak dilakukan persiapan sosial berupa penguatan sikap dan nilai norma yang baik yang sebelumnya telah ada di Rancanumpang.

c. Ekonomi

Pada aspek ekonomi masyarakat juga akan terjadi perubahan terkait dengan berdirinya PLTSA dan bangunan lain yang terintegrasi. Perubahan positif yang akan muncul antara lain peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang semula hanya bergantung pada sektor agraris menjadi semakin bervariasi, yaitu tumbuh dan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa yang menggeser sektor pertanian.

Namun demikian pendirian PLTSA yang membutuhkan lahan kurang lebih 10 Ha, mengambil alih fungsi lahan yang tadinya digunakan untuk pertanian. Dengan demikian petani pemilik dan petani penggarap kehilangan sumber penghasilan tetap. Khususnya petani penggarap yang tidak mendapatkan uang ganti rugi karena tanah garapannya dijual oleh pemiliknya. Hilangnya mata pencaharian petani penggarap merupakan dampak negatif

penting yang perlu segera mendapatkan solusi agar kelangsungan hidup dan taraf hidup petani penggarap tidak terganggu.

Kesempatan kerja bagi warga Rancanumpang dan Gedebage pada umumnya, dimungkinkan pada masa konstruksi dan operasional. Apalagi jika pihak pengembang menepati janjinya untuk lebih memberi kesempatan kepada warga terdekat yang membutuhkan pekerjaan. Adanya kesempatan kerja yang dapat dijangkau oleh masyarakat setempat merupakan dampak positif penting akibat berdirinya PLTSA di Rancanumpang.

Sejalan dengan perubahan ekonomi masyarakat yang semakin dinamis, akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat yang merupakan dampak positif. Namun demikian terkait dengan peningkatan daya beli memunculkan perilaku konsumtif sebagai dampak negatifnya.

d. Kesehatan

Secara umum, kesehatan tidak saja bebas dari suatu penyakit, melainkan mencakup kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kesehatan masyarakat sekitar PLTSA akan bergantung kepada pihak pengelola PLTSA. Apakah keberadaan PLTSA akan menimbulkan polusi yang akan mengancam kesehatan warga, ataukah apakah beroperasinya PLTSA menimbulkan kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan warga akan dampak negatif berupa polutan yang berbahaya yang bisa merugikan warga.

Hasil wawancara terhadap sejumlah warga khususnya yang kontra, terungkap bahwa pendirian PLTSA sangat mengganggu pikiran mereka. Berbagai dampak negatif yang dikhawatirkan muncul (lihat pendapat warga yang kontra) selalu mengganggu ketenangan mereka. Apalagi bila PLTSA benar-benar akan jadi dibangun di wilayah pemukiman mereka, kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan yang dirasakan akan sangat mengganggu ketentraman dan ketenangan hidup di tempat mereka bermukim sekarang. Gangguan terhadap ketenangan dan ketentraman hidup merupakan dampak negatif penting yang perlu mendapat perhatian serius, karena warga yang sekarang bermukim di wilayah perumahan Cempaka Arum dan Bumi Pitaloka mempunyai hak untuk hidup tenang dan tanpa ketakutan dan kecemasan.

Pada tahap konstruksi polusi asap dan debu sangat mungkin mengganggu ketenangan masyarakat yang bermukim di sekitar pembangunan PLTSA. Lalu lalang kendaraan proyek, proses penggalian, penimbunan, pengemboran tanah maupun proses konstruksi akan menimbulkan asap dan debu yang akan mengganggu kehidupan warga yang tinggal berdekatan dengan pembangunan PLTSA. Gangguan asap dan debu pada tahap konstruksi dapat menjadi dampak negatif penting yang akan mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga sekitar proyek PLTSA.

Polusi berupa asap dan debu ketika tahap operasional PLTSA, yang sangat mungkin mengandung zat-zat yang berbahaya akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar apabila pihak pengelola tidak mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Namun sesuai dengan komitmen dan tujuan pendirian PLTSA yaitu untuk menyelamatkan Kota Bandung dari timbunan sampah yang membahayakan kesehatan, maka pihak pengelola diharapkan mematuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga keamanan dan kesehatan masyarakat sekitar PLTSA dapat terjamin.

Hal lain yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman adalah kebisingan yang sangat mungkin sekali terdengar ke pemukiman warga yang dekat dengan lokasi PLTSA. Kebisingan dapat terjadi pada saat konstruksi ketika aktivitas proyek berjalan, dapat timbul dari proses pengerjaan bangunan fisik maupun lalu lalang kendaraan proyek. Kebisingan pada tahap operasional bisa disebabkan dari lalu lalang kendaraan truk pengangkut sampah, yang diprediksi tidak akan pernah berhenti sepanjang hari. Sedangkan kebisingan karena suara pengolahan sampah, disampaikan oleh beberapa warga yang pernah studi banding ke Singapura tidak akan terlalu mengganggu, karena suaranya hanya seperti kompor gas erma-war yang ada di tukang gorengan. Kebisingan karena lalu lalang truk pengangkut sampah dapat menjadi dampak negatif yang akan mengganggu ketentraman warga yang berdekatan dengan PLTSA.

Namun demikian pengelolaan sampah yang dilakukan oleh PLTSA menggunakan teknologi tinggi dan telah melalui pengujian di beberapa negara yang telah menggunakannya. Berbagai proses pengolahan dari mulai sampah basah yang baru datang sampai ter-

hancurkannya menjadi abu telah melalui serangkaian proses perhitungan ahli-ahli yang kompeten, sehingga dampaknya terhadap lingkungan diharapkan minim/tidak ada sama sekali. Dengan perhitungan yang matang baik dari pelbagai segi dan dengan melihat dan mengkaji PLTSA yang telah di negara lain seperti Singapura dan RRC, diharapkan tidak muncul pelbagai macam penyakit.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari temuan dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan:

a. Resistensi masyarakat

Permasalahan sosial yang telah muncul terkait pembangunan PLTSA Gedebage adalah:

pertama, munculnya kegelisahan masyarakat karena perilaku birokrasi Pemerintah Kota Bandung yang dinilai tidak partisipatif, tidak demokratis dan tidak transparan. Hal ini dirasakan oleh masyarakat yang berdekatan dengan rencana lokasi PLTSA. Perlakuan kurang partisipatif, demokratis, dan transparan itu terlihat dari tidak adanya komunikasi dan informasi langsung kepada mereka ketika gagasan PLTSA itu diluncurkan. Mereka mengetahui bahwa dekat pemukiman mereka akan dijadikan calon lokasi PLTSA justru dari media massa. Ketika keresahan itu semakin berkembang yang terlihat dari pelbagai aksi masyarakat baik aksi unjuk rasa dengan mengerahkan massa kepada pihak-pihak terkait pembangunan PLTSA dan pemasangan spanduk anti PLTSA, Pemerintah Kota Bandung baru (mau) mengadakan sosialisasi dan penjelasan secara langsung kepada warga masyarakat khususnya yang berdekatan dengan calon lokasi, itupun lebih banyak di lingkungan masyarakat yang pro pendirian PLTSA (penduduk asli). Kegelisahan sosial tersebut berakibat pada terganggunya keharmonisan sosial dalam masyarakat khususnya penduduk pendatang yang bermukim di kompleks perumahan (Cempaka Arum, Griya Pitaloka). Ketidak harmonisan keluarga tersebut antara lain terlihat ketika ada pertemuan warga yang kebetulan di rumah warga yang pro PLTSA, maka yang kontra serta merta tidak mau datang, dan demikian sebaliknya. Contoh lain, jika ada pengajian (khusus warga muslim) di rumah warga yang kontra, maka serta merta yang pro

tidak mau datang. Kondisi yang demikian tidak terjadi sebelum munculnya rencana PLTSA Gede-bage. Pendek kata, kebersamaan dalam masyarakat (modal sosial) terganggu atau kain sosial itu sudah tidak utuh lagi.

Kedua, munculnya konflik sosial (vertikal-horizontal). Konflik sosial vertikal terlihat dari aksi demo dengan pengerahan massa oleh warga yang kontra terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab pembangunan PLTSA baik Pemerintah Kota maupun pengembang. Konflik sosial tersebut juga berwujud *class action* dari warga yang kontra melalui pengadilan setempat.

b. Prakiraan dampak yang muncul

1. Aspek budaya

Meskipun dari sisi positif dimungkinkan muncul perilaku disiplin, bersih dan rapi akibat pembangunan PLTSA dan pembangunan lain secara terintegrasi itu, tetapi dampak negatif juga tidak terhindarkan, antara lain munculnya perubahan perilaku masyarakat dari agraris ke industri. Secara kultural akan terjadi *shock culture* (kejutan budaya) yang memicu munculnya permasalahan sosial sebagai akibat ketidaksiapan masyarakat setempat menghadapi perubahan situasi dan kondisi baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Dampak lain akibat industrialisasi tersebut adalah tumbuhnya prostitusi karena banyaknya permintaan. Disamping itu juga akan munculnya permasalahan sosial patologis lainnya.

2. Aspek ekonomi

Meskipun PLTSA akan menyerap tenaga kerja lokal, tetapi tetap terbatas baik kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, tingkat pendidikan penduduk adalah rendah yang berimplikasi pada jenis pekerjaan yang diserap PLTSA. Asumsinya, semakin tinggi teknologi yang digunakan akan semakin tinggi keterampilan yang dibutuhkan. Artinya adalah akan terjadi pengangguran yang berarti akan bertambahnya jumlah penduduk miskin.

3. Aspek kesehatan

Merujuk kasus di Inggris bahwa dalam kurun waktu tertentu (10-an tahun) akan terjadi frigiditas baik dikalangan kaum hawa maupun laki-laki akibat asap pembakaran sampah. Artinya adalah dari sisi kesehatan asap yang

keluar dari cerobong PLTSA tidak menguntungkan manusia bahkan dapat mengancam eksistensinya.

Bertolak dari kesimpulan tersebut disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek sosial

Pemerintah Kota Bandung melalui dinas terkaitnya perlu lebih mengoptimalkan pendekatan kepada kelompok masyarakat yang kontra secara lebih intensif meskipun memerlukan waktu, biaya yang tidak sedikit, dan melelahkan pikiran. Pendekatan intensif itu antara lain dengan mendatangi langsung dan menjelaskan sejujur-jujurnya proyek PLTSA dalam kerangka penanganan sampah di Bandung secara komprehensif.

2. Aspek lain

Dari aspek ekonomi, pihak Pemkot Bandung perlu membuat kebijakan terkait lapangan pekerjaan dan/atau menyediakan aksesibilitas sumber ekonomi bagi penduduk lokal terkait pembangunan PLTSA. Aspek kesehatan, Pemkot Bandung dan pihak pengembang perlu menjelaskan secara tuntas tentang ketidakberbahayaan asap yang keluar dari cerobong PLTSA secara rasional dengan merujuk kepada pengalaman negara maju. Dan dari aspek budaya, perlu penyiapan masyarakat secara mental-sosial dengan melibatkan ilmuwan sosial dalam kerangka meminimalisasi dampak negatif bertemunya pelbagai budaya yang berlainan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adi, Isbandi Rukminto. (2002). *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: FE-UI.
- Korten, David. (1984). *People Centered Development*. Kumarian Press.
- Midgley, James. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*, London: SAGE Publication Inc.

ARTIKEL-ARTIKEL & SURAT KABAR :

1. Surat dukungan LSM Internasional (2008)
2. Media Informasi PLTSa. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. 2008.

DOKUMEN LAIN :

1. AMDAL (2008) Oleh ITB
2. Monografi Kelurahan Rancanumpang (2008).
3. Monografi Kecamatan Gedebage (2008).
4. *ESCAP Training in Social Development*.
5. Dinas Tata Kota Bandung (2008).
6. BPLHD Kota Bandung (2008).
7. BAPPEDA Kota Bandung (2008).
8. <http://raiaapresentasi.com>, 24/4 2010.
9. <http://id.wikipedia.org/wiki/resistensi>, 24/4 2010.

CATATAN KAKI :

- ¹⁾ Diangkat dari hasil studi lapangan tentang "Rencana Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (PLTSa): Analisis Dampak Lingkungan Aspek Sosial Di Gedebage Bandung)" tahun 2008, oleh sebuah tim yang terdiri dari: Muchtar, Rini Hartini Rinda A., Arif Syafrudin, Danyi, dan Wagiyem, serta konsultan Dr. Taufiq Afif (ITB). Atas sepengetahuan dan izin beliau-beliau tulisan ini diangkat. Dengan demikian, segala konsekuensinya ada pada penulis.

Biadata Penulis :

Peneliti Puslitbang Kesos, Kementerian Sosial R.I.